LPT TAHUN 2019

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

ALAMAT: JL. MAJAPAHIT (KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN)
KABUPATEN KARANGANYAR

Kata Pengantar

Penyusunan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari partisipasi seluruh pihak yang telah secara maksimal melaksanakan seluruh program dan kegiatan bidang kepegawaian selama satu tahun anggaran 2019.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas dibidang kepegawaian sekaligus sebagai bahan penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) oleh Bupati Karanganyar Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini merupakan realisasi pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya selama Tahun 2019. Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas ini kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk tercapainya kualitas laporan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka apabila ada kekurang sempurnaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menentukan harapan di masa yang akan datang agar lebih baik dari masa lalu dan masa kini yang telah kita lalui.

Karanganyar, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SISWANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611128 198211 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Maksud dan Tujuan 2

BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA 3

A. Tugas dan Fungsi 3

B. Struktur Organisasi 4

C. Kepegawaian 7

BAB III GARIS-GARIS PROGRAM KERJA 10

A. Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2019 10

B. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja 12

C. Permasalahan dan Solusi 15

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI 17

A. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib 17

B. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pilihan 26

BAB V TUGAS PEMBANTUAN 27

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 28

BAB VII PENUTUP 31

A. Kesimpulan 31

B. Saran 31

HALAMAN LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sekaligus merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian, maka sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Karanganyar perlu membuat dan menyusun laporan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun.

Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang sekaligus untuk diinformasikan kepada masyarakat seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
DESKRIPSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

A. Tugas Dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

1. Tugas

   Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian.

2. Fungsi
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian.
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan dan mutasi membawahi pengadaan dan penempatan, kenaikan pangkat, mutasi.
   c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi informasi dan pengembangan SDM membawahi informasi dan pelaporan, diklat aparatur, pengembangan dan dokumentasi.
   d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian yang meliputi, penegakan disiplin, kesejahteraan, pensiun.
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

      Nomor : 19 Tahun 2018

      Tanggal : 19 Desember 2018

      Tentang : APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.

b. Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor : 92 Tahun 2018
Tanggal : 20 Desember 2018
Tentang : Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang pelaksanaannya diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, struktur organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretaris, yang dibantu :
   - Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Keuangan
   - Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pengangkatan dan Mutasi, yang dibantu :
   - Ka. Sub Bid. Pengadaan dan Penempatan
   - Ka. Sub Bid. Kenaikan Pangkat
   - Ka. Sub Bid. Mutasi
d. Bidang Informasi dan Pengembangan SDM, yang dibantu :
   - Ka. Sub Bid. Informasi dan Pelaporan
   - Ka. Sub Bid. Diklat Aparatur
   - Ka. Sub Bid. Pengembangan dan Dokumentasi
e. Bidang Pembinaan, yang dibantu :
   - Ka. Sub Bid. Penegakan Disiplin
   - Ka. Sub Bid. Kesejahteraan
   - Ka. Sub Bid. Pensiun

STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM
KABUPATEN KARANGANYAR SESUAI PERDA KAB.KARANGANYAR

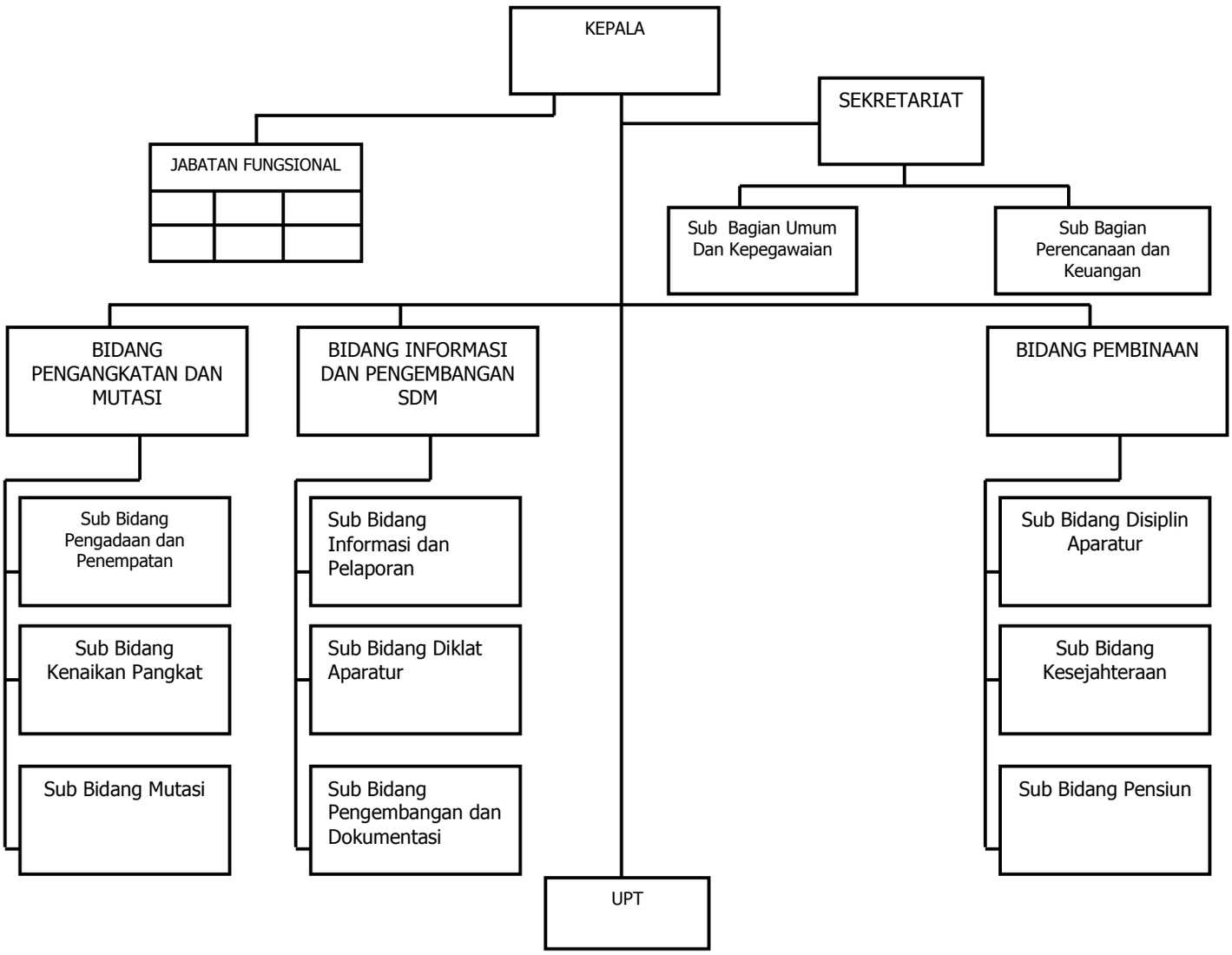

Susunan Pejabat Struktural Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan : Drs. Siswanto, M.M.
2. Sekretaris : -
   a. Ka. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan : Purweni Dewi, SE, Ak. M.M.
   b. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : -

3. Ka. Bid. Pengangkatan & Mutasi : Drs. Nurhasan Wahyuriyanto
   a. Ka. Sub. Bid. Pengadaan dan Penempatan : -
   b. Ka. Sub. Bid. Kenaikan , Pangkat : Isniari Dewi M, S.STP
   c. Ka. Sub. Bid. Mutasi : Isnan Nur Azis, S.Kom
4. Ka. Bid. Informasi dan Pengembangan SDM : Dwi Wahyuningsih, S.H, M.M.
   a. Ka. Sub. Bid. Informasi dan Pelaporan : Djoko Sumarsono, S.E.
   b. Ka. Sub. Bid.Diklat Aparatur : Gendro Jawardi, S. Sos
   c. Ka. Sub. Bid. Pengembangan dan Dokumentasi : Dessy Marsistawati, S.E
5. Ka. Bid. Pembinaan : -
   a. Ka. Sub. Bid. Disiplin Aparatur : Sugiyarto, S.H.
   b. Ka. Sub. Bid. Kesejahteraan : Drita Evana Setianita, S.Psi, Psi, M.M.
   c. Ka. Sub. Bid. Pensiun : Andrean Adhi S. S.E., M.M.

C. Kepegawaian:

1. Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar didukung oleh 46 orang aparatur yang keseluruhannya telah diangkat menjadi PNS.

DAFTAR PEGAWAI

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS/CPNS)	PANGKAT/ GOL.
1	Drs. Siswanto, M.M.	NIP. 19611128 198211 1 001	PNS	IV/c
2	Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M	NIP. 19690711 199603 2 002	PNS	IV/a
3	Drs. Nurhasan Wahyuriyanto	NIP. 19630310 199503 1 003	PNS	IV/a
4	Drita Evana S., S.Psi,Psi. M.M.	NIP. 19781029 200312 2 005	PNS	IV/a
5	Purweni Dewi, S.E., Ak.,M.M.	NIP. 19710724 200501 2 005	PNS	III/d
6	Dessy Marsistawati, S.E	NIP. 19721215 199803 2 005	PNS	III/d
7	Gendro Jarwadi, S. Sos.	NIP. 19630621 198607 1 001	PNS	III/d
8	Sugiyarto, S.H.	NIP. 19671001 198710 1 001	PNS	III/d
9	Djoko Sumarsono, S.E	NIP. 19740111 199603 1 002	PNS	III/d
10	Isniari Dewi M, S.STP	NIP. 19770124 199703 2 004	PNS	III/d
11	Isnan Nur Aziz, S.Kom	NIP. 19780210 200501 1 016	PNS	III/d
12	Andrean Adhi S. S.E., M.M.	NIP. 19751116 200604 1 004	PNS	III/d
13	Sunarti, S.E	NIP. 19630906 198712 2 001	PNS	III/d
14	Naniek Haryani, S.E.	NIP. 19661224 198603 2 007	PNS	III/d
15	Budiharjo, S.Sos	NIP. 19690923 199002 1 001	PNS	III/d
16	Diana Ary Andriyati, S.H	NIP. 19830704 200604 2 008	PNS	III/d
17	Tintien Hernawati, S.Sos	NIP. 19700705 199201 2 001	PNS	III/c
18	Tugiyo, S.Sos	NIP. 19720205 199203 1 009	PNS	III/c
19	Arief Syarifudin, S.Si	NIP. 19800620 200902 1 002	PNS	III/c
20	Irine Magdalena Elsye, SE	NIP. 19810920 200902 2 003	PNS	III/c
21	Jalu Setio Bintoro, S.Sos, M.Si	NIP. 19820211 200902 1 003	PNS	III/c
22	Romi Erlandono, S.Psi	NIP. 19730513 200604 1 005	PNS	III/c
23	Janes Cucuk Hartanto, SE.MM.	NIP. 19830122 200901 1 005	PNS	III/c
24	Ambarini, SE, M.M .	NIP. 19760307 199703 2 004	PNS	III/c

25	Lulus Nugroho, S.Psi	NIP. 19790411 201001 1 017	PNS	III/c
26	Tweyrianti Nuzulita S, S.Psi, MM.	NIP. 19780121 201001 2 015	PNS	III/c
27	Joko Pramono, S.E.	NIP. 19701123 201001 1 005	PNS	III/c
28	Yusuf Mustofa, S.Si	NIP. 19781120 201001 1 011	PNS	III/c
29	Anggara Nur Patria, S. Psi	NIP. 19850528 201101 1 004	PNS	III/c
30	V Nining Aryanti, S.Sos	NIP. 19761107 201001 2 010	PNS	III/c
31	Haryono, S.E.,S.H.,M.H.	NIP. 19801108 201101 1 004	PNS	III/c
32	Yoppy Nursendy Budiarso, S.E.MM.	NIP. 19861115 201101 1 009	PNS	III/c
33	Dwi Riyanto, A.Md.	NIP. 19741013 199903 1 005	PNS	III/b
34	Dieka Primawati, S.S.T.P, MM.	NIP. 19890607 201206 2 001	PNS	III/b
35	Joko Prasetyo, S.I.P.	NIP. 19880424 201101 1 009	PNS	III/b
36	Wahyu Yetti Isrudatini, S.AB, MM.	NIP. 19830131 201001 2 020	PNS	III/b
37	Sugiyarto, SE	NIP. 19800322 200604 1 011	PNS	III/a
38	Rizky Oktaria, S.Psi.	NIP. 19901027 201403 2 002	PNS	III/a
39	Fathu Kurniawan, A.Md	NIP. 19851212 201001 1 024	PNS	III/a
40	Eka Surya Putra, S.S.T.P	NIP. 19931125 201708 1 002	PNS	III/a
41	FaridatulUmniyahS.STP	NIP. 19940405 201609 2 003	PNS	III/a
42	Adrian Unggul Wirawan, A.Md	NIP. 19820620 201101 1 013	PNS	II/d
43	Priyo Pinardi, A.Md	NIP. 19840510 201101 1 012	PNS	II/d
44	Suroso Budi Santoso	NIP. 19740719 200501 1 001	PNS	II/d
45	Dwi Setyo Purnomo	NIP. 19861023 201001 1 017	PNS	II/b
46	Suparno	NIP. 19811203 201001 1 003	PNS	I/c

2. Daftar Pejabat Struktural OPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Drs. Siswanto, M.M.	Kepala BKPSDM	SUDAH	SUDAH
2	-	Sekretaris BKPSDM	-	-
3	Dwi Wahyuningsih, S.H., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan SDM	SUDAH	SUDAH
4	-	Kabid. Pembinaan	-	-
5	Drs. Nurhasan Wahyuriyanto	Kabid. Pengangkatan dan mutasi	SUDAH	SUDAH
6	-	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	-	-
7	Purweni Dewi, S.E. Ak., M.M.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	SUDAH	SUDAH

8	Dessy Marsistawati, S.E	Kasubbag. Pengembangan dan Dokumentasi	SUDAH	SUDAH
9	Gendro Jarwadi, S. Sos.	Kasubbid. Diklat Aparatur	SUDAH	SUDAH
10	Sugiyarto, S.H.	Kasubbag. Disiplin Aparatur	SUDAH	SUDAH
11	-	Kasubbid Pengadaan dan Penempatan	-	-
12	Djoko Sumarsono, S.E	Kasubbid Informasi dan Pelaporan	SUDAH	SUDAH
13	Drita Evana S., S.Psi,Psi.	Kasubbid. Kesejahteraan	SUDAH	SUDAH
14	Isniari Dewi M, S.STP	Kasubbid. Kenaikan Pangkat	SUDAH	SUDAH
15	Isnan Nur Aziz, S.Kom	Kasubbid Mutasi	SUDAH	SUDAH
16	Andrean Adhi S. S.E., MM.	Kasubbid. Pensiun	SUDAH	SUDAH

3. Daftar Pejabat Struktural Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1	Sekretaris BKPSDM	III
2	Kabid. Pembinaan	III
3	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IV
4	Kasubbid Pengadaan dan Penempatan	IV

4. Daftar THL (Tenaga Harian Lepas)

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sutrisno	THL
2	Gunadi	THL
3	Dhoimas Apriliyadi	THL

BAB III
GARIS-GARIS PROGRAM KERJA

A. Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2019

Dalam rangka pencapaian VISI dan MISI melalui Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan melaksanakan berbagai Program dan kegiatan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten atau Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Maka dengan mendasarkan pada Permendagri tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan Program/kegiatan sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
   1. Penyediaan jasa surat menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik & Internet
   3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
   6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   7. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
   8. Penyediaan Makanan Dan Minuman
   9. Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam/Luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
   1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
   3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan:
   1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
   3. Penyusun Renstra OPD

D. Program Pendidikan Kedinasan:
   1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III
   2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
   1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Tugas Fungsi Bagi PNSD
   2. Dokumentasi Arsip Digital
   3. Beasiswa PNS Tugas Belajar
   4. Pelatihan Dasar CPNS

F. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur:
   1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
   2. Penempatan PNS
   3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
   4. Pengelolaan SIMPEG
   5. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
   6. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/Golongan Dan Penyesuaian Ijazah
   7. Penyelesaian ijin Perkawinan dan Perceraian
   8. Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai
   9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian
   10. Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS
   11. Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS "SATYA LANCANA KARYA SATYA"
   12. Pemerataan PNS
   13. Penyelesaian Ijin Belajar Dan Ijin Penggunaan Gelar
   14. Penilaian Prestasi Kerja PNS
   15. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama
   16. Pemberian Layanan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)
   17. Pemberian Cuti PNS

18. Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara
19. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
20. Pembekalan PNS Pra Purna Tugas

B. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja

Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia seluruhnya adalah merupakan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 12.999.532.000,- (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.680.532.000,-
b. Belanja Langsung : Rp. 7.319.000.000,-

Tingkat realisasi belanja untuk masing-masing jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tidak langsung:
   1) Pagu anggaran : Rp. 5.680.532.000,-
   2) Realisasi anggaran : Rp. 4.881.181.228,-
b. Belanja Langsung:
   1) Pagu anggaran : Rp. 7.319.000.000,-
   2) Realisasi anggaran : Rp. 5.812.025.203,-

Tingkat realisasi belanja seluruhnya :

a. Jumlah pagu dana seluruhnya : Rp. 12.999.532.000,-
b. Realisasi anggaran seluruhnya : Rp. 10.693.206.431,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**365.468.000,-**	**342.348.887,-**	**93,67**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.294.000,-	75.745.964,-	92,04
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	65.200.000,-	62.600.000,-	96,01
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,-	24.546.500,-	98,19
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,-	24.492.500,-	97,97
6	Penyediaan Komponen	7.598.000,-	7.564.200,-	99,56

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.376.000,-	2.310.000,-	97,22
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000,-	10.045.000,-	45,66
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	134.000.000,-	133.042.723,-	99,29
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**189.800.000,-**	**177.518.075,-**	**93,53**
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,-	15.000.000,-	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000,-	19.855.000,-	99,28
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	129.800.000,-	122.095.325,-	94,06
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000,-	20.567.750,-	82,27
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**95.582.000,-**	**84.374.000,-**	**88,27**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.582.000,-	34.432.000,-	99,57
2	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	21.000.000,-	21.000.000,-	100
3	Penyusunan Renstra OPD	40.000.000,-	28.942.000,-	72,36
IV	**Program Pendidikan Kedinasan**	**528.000.000,-**	**505.846.775,-**	**95,80**
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	132.500.000,-	128.934.775,-	97,31
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	395.500.000,-	376.912.000,-	95,30
V	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**4.663.172.000,-**	4.030.289.010,-	86,43
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	495.272.000,-	465.262.010,-	93,94
2	Dokumentasi Arsip Digital	3.800.000,-	3.790.750,-	99,76
3	Beasiswa PNS Tugas Belajar	630.000.000,-	78.765.850,-	12,50
4	Pelatihan Dasar CPNS	3.534.100.000,-	3.482.470.400,-	98,54
VI	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**1.476.978.000,-**	**671.650.456,-**	**45,47**
1	Penyusunan Rencana	55.705.000,-	13.555.300,-	24,33

	Pembinaan Karir PNS			
2	Penempatan PNS	25.500.000,-	23.812.750,-	93,38
3	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	45.700.000,-	45.416.311,-	99,38
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	25.000.000,-	23.508.000,-	94,03
5	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	94.000.000,-	83.012.800,-	88,31
6	Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan / Penyesuaian Ijasah	5.900.000,-	5.603.750,-	94,98
7	Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian	25.500.000,-	20.653.350,-	80,99
8	Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai	10.000.000,-	9.927.500,-	99,28
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	38.800.000,-	37.687.850,-	97,13
10	Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS	52.000.000,-	49.375.500,-	94,95
11	Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS " SATYALANCANA KARYA SATYA "	10.000.000,-	7.725.050,-	77,25
12	Pemerataan PNS	15.000.000,-	8.108.300,-	54,06
13	Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar	8.200.000,-	7.124.700,-	86,89
14	Penilaian Prestasi Kerja PNS	40.000.000,-	39.966.250,-	99,92
15	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	330.173.000,-	98.283.741,-	29,77
16	Pemberian Layanan Klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)	5.000.000,-	2.396.250,-	47,93
17	Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil	5.000.000,-	4.995.000,-	99,90
18	Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara	600.000.000,-	124.688.804,-	20,78
19	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jabatan Fungsional	30.000.000,-	12.427.500,-	41,47
20	Pembekalan PNS Pra Purna Tugas	55.500.000,-	12.427.500,-	41,43

C. Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 selain telah dicapai adanya keberhasilan-keberhasilan juga masih dijumpai adanya masalah-masalah yang masih terjadi, yaitu antara lain:

1. Beberapa permasalahan yang masih terjadi antara lain :
    a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
        1). Ketiadaan mesin pembangkit listrik portable (genset) sehingga apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN maka aktivitas pelayanan yang membutuhkan daya listrik akan terhenti.
    b. Program Pendidikan Kedinasan:
        1). Masih adanya Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV yang belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya ;
        2). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 7 ayat (1) disebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut , masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklat Struktural) sesuai eselonnya.
    c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur:
        1). Masih dijumpai adanya pengangkatan jabatan yang belum sesuai dengan kompetensi Jabatan;
        2). Kualitas disiplin aparatur masih perlu untuk ditingkatkan;
        3). Semakin rendahnya tingkat kesadaran PNS terhadap nilai-nilai lembaga pernikahan.
        4). Adanya moratorium pengangkatan CASN yang mengakibatkan adanya kekurangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk mengatasi masalah-masalah yang masih terjadi tersebut diatas, kami sarankan dan kami rencanakan solusinya sebagai berikut:

a. Mengusulkan pengadaan mesin pembangkit listrik portable (genset);
b. Merencanakan pelaksanaan Kegiatan Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya untuk Pejabatan Struktural Eselon II, III dan IV;
c. Meningkatkan kompetensi staf yang telah mengikuti Diklat ;
d. Segera melaksanakan Diklat Pimpinan untuk Pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Pim sesuai eselonnya;
e. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan disiplin aparatur secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010;
f. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai pernikahan bagi PNS terutama yang telah menduduki jabatan sehingga dapat memberikan contoh yang baik terhadap PNS bawahannya.
g. Pelaksanaan Diklat satu pintu sebagaimana ditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 890/3961/SJ Tanggal 10 November 2009 tentang Pedoman Reformasi Diklat Aparatur di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI

A. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN

Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2019 terdiri atas 6 Program yang terbagi menjadi 40 kegiatan, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN

a. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja 900 surat dan capaian kinerja terselesaikannya kegiatan surat menyurat dinas sebanyak 900 surat (100%) selisih capaian dengan target 0 surat. Anggaran Rp. 2.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- (100%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Target Kinerja 12 bulan capaian kinerja terpenuhinya fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas sejumlah 12 bulan (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 82.294.000,- realisasi sebesar Rp. 75.745.964,- (92,04%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 6.548.036,-

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target Kinerja 23 jenis barang dan 3 kegiatan, terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor 23 jenis barang dan 3 kegiatan, selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 65.200.000,- realisasi sebesar Rp. 62.600.000,- (96,01%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.600.000 ,-

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target Kinerja 51 jenis ATK capaian kinerja terselesaikannya administrasi perkantoran yang tertib dengan 51 jenis ATK (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 24.546.500,- (98,19%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 453.500,-

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target Kinerja 2 jenis/12 bulan capaian kinerja terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dalam penyelesaian tugas bidang kepegawaian sejumlah 2 jenis /12 bulan (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 24.492.500,- (97,97%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.507.500,-

f) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Target Kinerja 7 jenis barang capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor sejumlah 7 jenis barang/12 bulan (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 7.598.000,- realisasi sebesar Rp. 7.564.200,- (99,56%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.33.800,-

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target kinerja 720 terbitan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan surat kabar sejumlah 720 (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 2.376.000,- realisasi sebesar Rp. 2.310.000,- (97,22%) selisih realisasi dengan anggaran Rp. 66.000,-

h) Penyediaan Makanan dan Minuman

Target Kinerja 783 orang/dos capaian kinerja terselenggaranya rapat-rapat koordinasi bidang kepegawaian 100% (seluruh rapat-rapat non kegiatan) untuk sejumlah 353 orang/dos (45%) selisih capaian dengan target 430 orang/dos. Anggaran Rp. 22.000.000,- realisasi sebesar Rp. 10.045.000,- (45,66%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 11.955.000,-

- Permasalahan : Makan minum tamu sesuai dengan kebutuhan.

  Solusi : Menyesuaikan tamu yang datang.

i) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Dalam/luar Daerah

Target Kinerja 100 % capaian kinerja tercapainya keterpaduan pelaksanaan kegiatan pada seluruh unit yang terkait untuk 2 jenis (100%). Anggaran Rp. 134.000.000,- realisasi sebesar Rp. 133.042.723,- (99,29%) selisih realisasi dengan Anggaran Rp. 957.277,-

2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Target kinerja 2 unit barang (2 unit Scanner) capaian kinerja tersedianya perlengkapan kantor pada unit kerja pelaksana teknis 2 unit barang (2 unit Scanner) (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (100%) selisih anggaran dengan realisasi 0,-

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja 2 jenis kegiatan pemeliharaan capaian kinerja gedung siap pakai 2 jenis pemeliharaan gedung (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 19.855.000,- (99,28%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 145.000,-

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Target kinerja 4 jenis kegiatan pemeliharaan capaian kinerja kendaraan operasional yg terawat dan siap jalan 6 mobil & 11 sepeda motor (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 129.800.000,- realisasi sebesar Rp.122.095.325,- (94,06%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 7.704.675,-

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja 7 jenis sarana capaian kinerja sarana siap pakai untuk kelancaran tugas sebanyak 7 jenis sarana (komputer,printer,AC split, AC berdiri,LCD, notebook dan tabung pemadam kebakaran) 100% selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.567.750,- (82,27%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 4.432.250,-

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target kinerja 8 jenis dokumen dari 41 kegiatan (1 keg BTL dan 40 keg BL) capaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang akuntabel sebanyak 8 dokumen/12 bulan (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 34.582.000,- realisasi sebesar Rp.

34.432.000,- (99,57%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 150.000,-

b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Target kinerja 12 bulan capaian kinerja tercapainya kelancaran pengelolaan keuangan yang akuntabel sebanyak 12 bulan (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 21.000.000,- realisasi sebesar Rp. 21.000.000,- (100%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.0,-

c) Penyusunan Renstra OPD

Target kinerja 3 jenis/12 bulan capaian kinerja tercapainya kelancaran pengelolaan keuangan yang akuntabel sebanyak 3 jenis/12 bulan (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 28.942.000,- (72,36%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 11.058.000,-

4) Program Pendidikan Kedinasan

a) Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Target kinerja 3 orang eselon III capaian kinerja Pejabat Struktural Eselon III yg lulus Diklat Pim Tingkat III sebanyak 3 orang eselon III (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 132.500.000,- realisasi Rp. 128.934.775,- (97,31%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 3.565.225,-

b) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Target kinerja 10 orang eselon IV capaian kinerja Pejabat Struktural Eselon IV yg lulus Diklat Pim Tingkat IV sebanyak 10 orang eselon IV (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 395.500.000,- realisasi Rp. 376.912.000,- (95,30%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 18.588.000,-.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD

Target kinerja 106 orang capaian kinerja meningkatnya kualitas SDM PNS dalam melaksanakan tugas sebanyak 73 orang (68,86%) selisih capaian dengan target 33 orang. Anggaran Rp. 495.272.000,- realisasi sebesar Rp. 465.262.010,- (93,94%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 30.009.900,-

b) Dokumentasi Arsip Digital

Target kinerja 3.000 arsip digital capaian kinerja dokumentasi arsip digital pegawai ASN sebanyak 3.000 arsip digital (100%) selisih capaian dengan target 0 arsip. Anggaran Rp. 3.800.000,- realisasi sebesar Rp. 3.790.750,- (99,76%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 9.250,-

c) Beasiswa PNS Tugas Belajar

Target kinerja 7 orang capaian kinerja meningkatnya kualitas SDM PNS dalam melaksanakan tugas sebanyak 7 orang (100%) selisih capaian dengan target 0 orang. Anggaran Rp. 630.000.000,- realisasi sebesar Rp. 78.765.850,- (12,50%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 551.234.150,-

- Permasalahan : Beasiswa tugas belajar Pasca Sarjana FE Akuntansi UNS 2orang baru dimulai bulan september 2019, sedangkan Program S2 dan S3 Fakultas Teknik UGM 5 orang kegiatan akademik dimulai bulan Februari 2020.

  Solusi : Menyesuaikan jadwal akademik.

d) Pelatihan Dasar CPNS

Target kinerja 354 orang capaian kinerja meningkatnya profesionalisme dan kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas sebanyak 354 orang (100%) selisih capaian dengan target 0 orang. Anggaran Rp. 3.534.100.000,- realisasi sebesar Rp. 3.482.470.400,- (98,54%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 51.629.600,-

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Target kinerja 200 jabatan capaian kinerja terselesaikannya kenaikan, perpindahan dan perubahan pada jabatan struktural, 0 orang selisih capaian dengan target 200 orang (0%) jabatan struktural . Anggaran Rp. 55.705.000,- realisasi sebesar Rp. 13.555.300,- (24,33%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 42.149.700,-.

- Permasalahan : Tidak adanya proses pengisian Jabatan .

  Solusi : Segera mengadakan pengisian Jabatan.

b) Penempatan PNS

Target kinerja terselesaikannya pengangkatan dan sumpah janji PNS sebanyak 354 orang per 42 OPD capaian kinerja terisinya formasi PNS pada seluruh OPD Kabupaten Karanganyar sebanyak 354 (100%) orang selisih capaian dengan target 0 orang. Anggaran Rp. 25.500.000,- realisasi sebesar Rp. 23.812.750,- (93,38%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 1.687.250,-.

c) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Target kinerja 2.000 orang capaian kinerja penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 1.599 (79,95%) orang selisih capaian dengan target 401 orang. Anggaran Rp.45.700.000,- realisasi sebesar Rp. 45.416.311,- (99,38%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 283.689,-.

d) Pengelolaan SIMPEG

Target kinerja 9.500 PNS capaian kinerja meningkatnya sistem informasi kepegawaian daerah sebanyak 8.949 PNS (94,27%) selisih capaian dengan target 544. Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 23.508.000,- (94,03%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 1.492.000,-.

e) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Target kinerja 42 OPD capaian kinerja meningkatnya disiplin dan ketertiban PNSD Kabupaten Karanganyar sebanyak 42 OPD (100%) Selisih capaian dengan target 0 Anggaran Rp. 94.000.000,-. realisasi sebesar Rp. 83.012.800,- (88,31%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 10.987.200,-.

f) Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan/ Penyesuaian Ijasah

Target kinerja 150 orang PNS capaian kinerja PNSD yg lulus ujian dinas dan penyesuaian ijasah sebanyak 115 orang PNS (76,6%) selisih capaian dengan target 35 orang PNS. Anggaran Rp. 5.900.000,- realisasi sebesar Rp. 5.603.750,- (94,98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.296.250,-.

g) Penyelesaian ijin Perkawinan dan Perceraian

Target kinerja 6 ajuan capaian kinerja terselesaikannya ajuan ijin perkawinan dan perceraian sejumlah 21 ajuan (350%) Selisih capaian dengan target 14 ajuan. Anggaran Rp. 25.500.000,-

realisasi sebesar Rp. 20.653.350,- (80,99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 4.846.650,-.

h) Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai

Target kinerja 400 kartu KPE capaian kinerja PNS Kabupaten Karanganyar memiliki kartu-kartu kepegawaian dan ID Card dan KPE 554 kartu (138%). selisih capaian dengan target 154 kartu. Anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 9.927.500,- (99,28%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 72.500,-.

i) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian

Target kinerja 43 OPD capaian kinerja PNSD yang menguasai Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak peserta 43 OPD (100%) selisih capaian dengan target 0. Anggaran Rp. 38.800.000,- realisasi sebesar Rp. 37.687.850,- (97,13%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.112.150,-.

j) Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS

Target kinerja 450 orang capaian kinerja PNS yang pensiun sebanyak 499 orang (110%) selisih capaian dengan target 49 orang. Anggaran Rp. 52.000.000,- realisasi sebesar Rp. 49.375.500,- (94,95%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.624.500,-.

k) Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS Satya Lancana Karya Satya

Target kinerja 200 orang capaian kinerja PNS dengan masa kerja 10 th, 20 th & 30 th yang berdedikasi baik mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI sebanyak 49 orang (24%) selisih capaian dengan target 151 orang. Anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 7.725.050,- (77,25%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.274.950,-.

l) Pemerataan PNS

Target kinerja 4.000 PNS capaian kinerja pemerataan PNS sebanyak 2.160 PNS (54%) selisih capaian dengan target 1840. Anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi sebesar Rp. 8.108.300,- (54,06%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 6.891.700,-

- Permasalahan : Adanya perubahan mekanisme mutasi sesuai peraturan BKN No 5 Tahun 2019 sehingga banyak proses mutasi yang belum terselesaikan.

Solusi : Mengikuti mekanisme mutasi sesuai peraturan BKN.

m) Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar

Target kinerja 350 ajuan capaian kinerja terbitnya surat ijin belajar, tugas belajar dan surat ijin pemakaian gelar bagi PNSD Kabupaten Karanganyar sebanyak 409 ajuan (116%) selisih capaian dengan target 59 ajuan. Anggaran Rp. 8.200.000,- realisasi sebesar Rp. 7.124.700,- (86,89%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 1.075.300,-.

n) Penilaian Prestasi Kerja PNS

Target kinerja 9.138 PNS/CPNS capaian kinerja terselenggaranya pembuatan SKP dan penilaian prestasi kerja PNS sebanyak 8.949 orang (98%) selisih capaian dengan target 189 orang. Anggaran Rp. 40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 39.966.250,- (99,92%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.33.750,-.

o) Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama

Target kinerja 6 jabatan capaian kinerja 1 jabatan (0,16%) selisih capaian dengan target 5 orang. Anggaran Rp. 330.173.000,- realisasi sebesar Rp. 98.283.741,- (29,77%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 231.889.259,-

- Permasalahan : Tidak adanya pengisian kekosongan Jabatan Tinggi Pratama.

Solisi : Tetap mengajukan pengisian Jabatan Tinggi Pratama sesuai kompetensi.

p) Pemberian Layanan Klain JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jamiinan Kematian)

Target kinerja 42 OPD orang capaian kinerja terwujudnya pemahaman dan terselenggaranya JKK JKM sebanyak 42 OPD (100%) selisih capaian dengan target 0 . Anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.396.250,- (47,93%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.603.750,-

- Permasalahan: Menyesuaikan pengajukan JKK JKM yang masuk.

Solusi : Tetap mengajukan sesuai dengan ajuan yang masuk.

q) Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Target kinerja 42 OPD orang capaian kinerja terselenggaranya pelayanan cuti kepada OPD sebanyak 42 OPD (100%) selisih capaian dengan target 0 . Anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.995.000,- (99,90%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 5000,-.

r) Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara

Target kinerja 354 formasi CPNS capaian kinerja terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan aparatur sebanyak 0 formasi (0%) selisih capaian dengan target 354 . Anggaran Rp. 600.000.000,- realisasi sebesar Rp. 124.688.804,- (20,78%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 475.311.196,-

- Permasalahan : Pelaksanaan SKD dan SKB CPNS dilaksanakan pada tahun 2020 dan belum adanya juknis penerimaan PPPK .
- Solusi : Pelaksanaan penerimaan CASN sesuai dengan Juknis.

s) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Jabatan Fungsional

Target kinerja 100 % capaian kinerja terlaksananya kenaikan, perpindahan dan perubahan jabatan fungsional khusus sebanyak 41% selisih capaian dengan target 100 jabatan fungsional . Anggaran Rp. 30.000.000,- realisasi sebesar Rp. 12.427.500,- (41,43%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 17.572.500,-.

- Permasalahan : Adanya perpanjangan proses inpasing sampai dengan Tahun 2021 sehingga ajuan pengangkatan dalam jabatan fungsional di Tahun 2019 tidak banyak terproses.

  Solusi : Proses pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai aturan.

t) Pembekalan PNS Pra Purna Tugas

Target kinerja 150 orang capaian kinerja terselenggaranya pembekalan PNS Pra purna tugas sebanyak 150 (100%) selisih capaian dengan target 0 . Anggaran Rp. 55.500.000,- realisasi sebesar Rp. 53.381.750,- (96,18%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.118.250,-.

B. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pilihan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah 2 kali yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**,** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan Urusan Pilihan.

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2019 sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mendapat tugas pembantuan.

BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

Tugas Umum Pemerintahan yang didalam hal ini meliputi:

A. Kerjasama Antar Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

   Dasar hukum: Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai NegerI Sipil Golongan I, II dan/atau III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau 2 Sebagaimana telah diubah dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai NegerI Sipil Golongan I, II dan/atau III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau 2 ; Perjanjian Kerjasama Nomor 892.1/10255/2019 dan Nomor 892.1/1044/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIADAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

2. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

   Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Karanganyar Nomor: 800/1119.22/VI/2019 dan PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 214.1Pj/61.05/BPA/2019 Tanggal 28 Juni 2019

tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

   Dasar hukum: Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III ; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Karanganyar dengan BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor : 892.1/9521/2019 dan Nomor : 892.1/0456/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Dan Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

4. UNIVERSITAS GADJAH MADA.

   Dasar hukum: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253). Perjanjian Kerja Sama BKPSDM Kabupaten Karanganyar Dengan Fakultas Teknik Ubiversitas Gadjah Mada Nomor : 893.3/1630.22 Dan Nomor : 6828a/UN1/FTK/AKD/HM/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Magister Dan Doktor Teknik.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN)
2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
3. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun)
5. DEPARTEMEN AGAMA (DEPAG)
6. KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR

7. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

D. Pembinaan Batas Wilayah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

F. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan Forum Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah; tugas-tugas Pembinaan Batas Wilayah; Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta tidak memiliki data Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya sebagaimana tersebut diatas.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sekaligus merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selama Tahun 2019, dari 6 program dan 40 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target kinerja atau kurang optimal dalam implementasinya. Diantara kegiatan tersebut yaitu Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Proses sudah dilakukan namun tidak adanya kenaikan, perpindahan dan perubahan pada jabatan struktural, Pemerataan PNS Adanya perubahan mekanisme mutasi sesuai peraturan BKN No 5 Tahun 2019 sehingga banyak proses mutasi yang belum terselesaikan, Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama tidak adanya pengisian kekosongan Jabatan Tinggi Pratama, Pemberian Layanan JKK Dan JKM Menyesuaikan pengajukan JKK dan JKM yang masuk, Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pelaksanaan SKD dan SKB CPNS dilaksanakan pada tahun 2020 dan belum adanya juknis penerimaan PPPK Tahun 2020 . Kurang optimalnya kegiatan tersebut dikarenakan melibatkan pihak lain dan ketergantungan dengan OPD lain dalam implementasinya sehingga untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang maksimal dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

B. SARAN

Untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, maka terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik di internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta instansi vertikal, meliputi lembaga pengelola kepegawaian tingkat regional, tingkat provinsi maupun

tingkat pusat. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja individu personel Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yaitu dengan rutin mengadakan kegiatan pelatihan team building.